

Penerapan lembaga paksa badan terhadap direksi Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan pailit

Yuda Rangga Prana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20301248&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan cara melakukan peminjaman kredit, baik untuk modal kerja maupun modal barang. Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian menjadi bangkrut dan/atau pailit, sehingga berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman kredit tersebut. Salah satu penyelesaian utang-piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan hal ini terkait dengan pertanggung jawaban Debitur. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh, karena ia yang menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu perseroan. Untuk selama proses pailit UU Kepailitan dan PKPU adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 93 ? 96. Hal ini dikaitkan dengan Pengaturan Lembaga Paksa Badan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Karena paksa badan dalam perkara kepailitan bertujuan agar Debitur kooperatif.

<hr>

**Abstract
**

The Limited Liability Company is a legal entity which purposed to find the benefits for developing their business. One of it with credit loans for working capital or capital goods. However in practice many companies having losses which to be failure or bankruptcy, it has influence on payment of credit loans. One of the settlement of debts and related with the failure on the field of business is a bankruptcy in accordance article 93 until 96 of Regulation of bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts is stated that the Bankrupt Debtor will be a hostage caused not fullfil their obligation. This is related with Regulation of Forced Institutions Agency in accordance the Regulation of Supreme Court Number 1 year 2000 regarding Forced Institutions Agency on the case of bankruptcy which is purposed for Bankruptcy Debtor intended to cooperate.